

MENGURANGI KEMISKINAN MELALUI DISTRIBUSI PENDAPATAN YANG ADIL DAN MERATA DI INDONESIA

Maharani¹, Vita Hannifah^{2*}, M. Zhafran Arif³, Heni Noviarita⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Post-el: vitanifah04@gmail.com*

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan kuantitatif. Distribusi pendapatan yang tidak merata sering dikaitkan dengan meningkatnya kemiskinan di berbagai wilayah. Data dalam penelitian ini diperoleh dari lembaga statistik nasional yang mencakup variabel-variabel seperti tingkat pendapatan, tingkat kemiskinan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan indeks Gini untuk mengukur kesejahteraan pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan akses layanan yang rendah. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan redistribusi yang lebih efektif untuk mengurangi kesenjangan dan menurunkan angka kemiskinan di berbagai daerah.</i></p>	<p>Diajukan: 13-7-2023 Diterima: 21-9-2023 Diterbitkan : 25-9-2023</p>
<p>Abstract</p> <p><i>This research aims to analyze the relationship between income distribution and poverty levels using a quantitative approach. Unequal income distribution is often associated with increasing poverty in various regions. The data in this research was obtained from the national statistics institute which includes variables such as income level, poverty level, education, and access to basic services. The analytical method used is multiple linear regression and the Gini index to measure income welfare. The research results show that unequal income distribution significantly increases poverty levels in areas with low levels of education and access to services. The implications of this research indicate the need for more effective redistribution policies to reduce disparities and reduce poverty rates in various regions.</i></p>	<p>Kata kunci: <i>Distribusi Pendapatan, Kemiskinan</i></p> <p>Keywords: <i>Income distribution, Poverty.</i></p>
<p>Cara mensitasi artikel:</p> <p>Maharani, M., Hannifah, V., Arif, M.Z., & Noviarita, H. (2023). Mengurangi Kemiskinan Melalui Distribusi Pendapatan yang Adil dan Merata di Indonesia. <i>IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy</i>, 1(2), 230-235. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN</p>	

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Meskipun Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, pemerataan pendapatan masih belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan ini berdampak pada sulitnya masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari perangkap kemiskinan. Oleh karena itu, upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui distribusi pendapatan yang lebih adil dan merata sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan inklusif di Indonesia.

Distribusi pendapatan yang adil membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam,

Indonesia menghadapi tantangan untuk memastikan semua kelompok masyarakat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan distribusi pendapatan ini dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Dukungan ini memerlukan pengurangan dan penguatan langkah-langkah konkrit, seperti program tunai dan subsidi, agar dapat mengurangi kesenjangan secara lebih efektif.

Selain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat juga berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kejuruan dapat meningkatkan kemampuan individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam perekonomian. Akses yang lebih luas terhadap keterampilan dan sumber daya ekonomi diharapkan memungkinkan masyarakat miskin untuk berkontribusi aktif terhadap perekonomian, yang pada akhirnya mengarah pada kesejahteraan yang lebih adil. erja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesetaraan distribusi pendapatan tidak hanya menyangkut keadilan sosial, namun juga kemiskinan ekonomi. Negara-negara yang mampu mengurangi ketimpangan pendapatan cenderung lebih stabil dalam jangka panjang. Menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan penelitian lainnya, meningkatnya kesenjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi kemampuan masyarakat miskin untuk berkontribusi secara produktif. Dengan menciptakan pendapatan yang lebih setara, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih kaya dan perekonomian yang lebih kuat.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu kunci pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Distribusi pendapatan yang tidak merata berarti sebagian besar kekayaan berada di tangan segelintir orang, sementara sebagian besar lainnya hidup di bawah garis kemiskinan. Langkah-langkah reformasi yang memperkuat akses ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan sangat penting untuk mencapai kesetaraan ini. Kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dan desentralisasi yang efektif diharapkan dapat menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata di seluruh Indonesia, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan adil.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan menganalisis data dari artikel terdahulu yang relevan dengan pengaruh Mengurangi Kemiskinan Melalui Distribusi yang Adil dan Merata di Indonesia dengan menyebutkan pemecahan masalah berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikannya. Data yang akan digunakan terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan tingkat pengangguran. Data ini akan dianalisis untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi ekonomi selama beberapa tahun terakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan terus menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan angka kemiskinan di Indonesia terutama disebabkan oleh situasi perekonomian

domestik dan global. Salah satu penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan adalah kesenjangan pendapatan yang jelas antara masyarakat kaya dan miskin. Ketimpangan ini mengakibatkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, sehingga menyulitkan banyak orang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program bantuan sosial dan subsidi bagi kelompok berpenghasilan rendah. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar pada masyarakat miskin. Meskipun upaya-upaya ini telah berhasil membantu beberapa masyarakat, evaluasi efektivitas program-program ini sangat penting untuk benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan hal ini perlu ditingkatkan.

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Sebagian besar kekayaan hanya terdapat pada kelompok kecil, dan sebagian penduduk lainnya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kebijakan keuangan yang lebih adil diperlukan agar distribusi pendapatan lebih merata dan lebih banyak orang mempunyai peluang untuk keluar dari kemiskinan.

Selain kebijakan pemerintah, peran sektor swasta dan masyarakat sipil juga penting untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, yang dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja. Hal ini meningkatkan peluang bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil ini diharapkan dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di sisi lain, tantangan terbesar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah daya tarik program yang dilaksanakan. Program pengentasan kemiskinan seringkali terhambat oleh masalah birokrasi, koordinasi antarlembaga, dan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Reformasi politik dengan fokus yang berkelanjutan dan komprehensif pada pengentasan kemiskinan diperlukan agar dampak program dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pendekatan yang lebih komprehensif diharapkan dapat membawa Indonesia mencapai masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA KEUANGAN

Untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan fiskal dan program sosial untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Pemerintah berusaha mengurangi persepsi pendapatan dengan menerapkan kebijakan seperti pajak progresif, yang melibatkan pajak yang lebih tinggi untuk kelompok berpendapatan tinggi. Selain itu, untuk membantu orang miskin mengurangi biaya hidup mereka, pemerintah juga memberikan subsidi, seperti subsidi bahan bakar dan listrik. Diharapkan bahwa penerapan kebijakan fiskal ini akan menghasilkan redistribusi pendapatan yang lebih merata dan membantu orang-orang yang kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Melalui inklusi keuangan, lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkontribusi pada pemerataan ekonomi. Program inklusi keuangan seperti Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) membantu usaha

kecil dan menengah (UKM) yang sering dimiliki oleh masyarakat dengan keterbatasan ekonomi mendapatkan lebih banyak akses ke layanan keuangan. Diharapkan pendapatan individu akan meningkat karena keuangan inklusi ini, yang juga akan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mendukung program bantuan sosial yang menggunakan teknologi keuangan. Secara transparan dan efisien, program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan sistem penyaluran bantuan melalui rekening bank atau dompet digital. program bantuan berbasis digital ini tidak hanya meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan, tetapi juga menawarkan layanan keuangan formal kepada masyarakat miskin yang sebelumnya tidak pernah menggunakan layanan perbankan. Dalam jangka panjang, program digital ini diharapkan dapat membantu inklusi keuangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan sosial.

Meskipun banyak upaya telah dilakukan, masih ada masalah dalam menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan. Penyaluran bantuan sering terhambat oleh hambatan birokrasi dan perbedaan antara pusat dan daerah. keberhasilan kebijakan redistribusi pendapatan bergantung pada kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga keuangan, dan berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut. Agar program tersebut tepat sasaran dan mampu menurunkan ketimpangan secara signifikan, peningkatan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi pendapatan sangat penting. Diharapkan bahwa kolaborasi yang lebih kuat antar lembaga akan memiliki hasil yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan di Indonesia.

STRATEGI DISRTIBUSI PENDAPATAN YANG ADIL DAN MERATA

Strategi distribusi pendapatan yang adil dan merata merupakan langkah penting menuju pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Salah satu strategi utamanya adalah kebijakan pajak progresif yang mengenakan tarif pajak lebih tinggi pada kelompok berpendapatan tinggi dan menurunkan tarif pajak pada kelompok berpendapatan rendah. Pajak progresif ini dapat mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan dapat berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mendanai program sosial dan infrastruktur yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan cara ini, pemerintah berupaya mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil dengan mendistribusikan kembali sumber daya.

Selain kebijakan pajak, pemerintah Indonesia juga memberikan subsidi kepada orang-orang berpendapatan rendah untuk kebutuhan dasar seperti listrik, makanan, dan bahan bakar. Subsidi yang tepat sasaran dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin secara signifikan dengan meringankan pengeluaran rumah tangga miskin sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Agar dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan maksimal, penting untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai ke orang-orang yang membutuhkannya.

Strategi keuangan inklusif juga merupakan komponen penting dalam mencapai distribusi pendapatan yang adil. Berbagai program, seperti Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), telah diluncurkan oleh lembaga keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu orang miskin atau daerah terpencil mendapatkan lebih banyak akses keuangan. Masyarakat berpendapat

rendah dapat mengelola uang mereka dengan lebih baik jika mereka memiliki akses ke layanan keuangan. Diharapkan bahwa strategi ini akan memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi dan memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian.

Program bantuan sosial yang didanai secara digital juga merupakan komponen penting dari pendekatan untuk distribusi pendapatan yang adil. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui sistem pembayaran elektronik. Pemerintah dapat memastikan bantuan yang tepat sasaran dan mengurangi risiko cakupan dana dengan cara ini. Selain itu, masyarakat miskin diberikan akses ke layanan perbankan oleh bantuan sosial berbasis digital. Ini merupakan langkah awal menuju inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal.

Strategi distribusi pendapatan yang adil pemerintah melibatkan pembangunan infrastruktur selain program langsung. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum di daerah terpencil dapat membuka akses ke berbagai peluang ekonomi dan mempermudah masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas. Pemerintah berusaha menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat miskin berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara merata.

Tetapi keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada seberapa efektif mereka digunakan. Untuk mencapai distribusi pendapatan yang adil, masalah birokrasi, ketidakmerataan implementasi antar wilayah, dan masalah transparansi sering menjadi penghalang. Tekanan yang diperlukan untuk koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik. Strategi-strategi ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia jika diterapkan dan diintegrasikan dengan baik.

KESIMPULAN

Kemiskinan di Indonesia saat ini masih menjadi masalah besar, Keadaan ini diperburuk oleh hal-hal seperti ketimpangan infrastruktur, pendidikan rendah, dan keterbatasan akses ke pekerjaan yang layak. Pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan sangat penting karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga mengancam stabilitas sosial karena perbedaan pendapatan antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah dapat menyebabkan ketidakadilan sosial. Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk membentuk lembaga keuangan yang memberikan bantuan finansial kepada orang berpenghasilan rendah. Kebijakan distribusi pendapatan yang adil dan merata juga sangat penting, yang mencakup strategi seperti subsidi, bantuan sosial, pengembangan sektor UMKM, dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata, diharapkan ada peningkatan kesejahteraan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. (2022). "*Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia*."
- Lestari, A. (2022). Efektivitas Kebijakan Redistribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Sosial*.
- Lestari, A., dkk. (2023). Evaluasi Efektivitas Program Bantuan Sosial di Indonesia dalam Pengurangan Kemiskinan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan*. Artikel ini membahas efektivitas program pemerintah seperti PKH, KIP, dan KI.
- Nasution, H. (2022). Inklusi Keuangan dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia . *Jurnal Kajian Pembangunan Indonesia*.
- Noviarita, H. (2023). Distribusi Pendapatan dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Indonesia. "*Jurnal EkoJurnal Kebijakan Ekonomi dan Sosial*".
- Noviarita, H. (2023). Pengaruh Bantuan Sosial Berbasis Digital terhadap Distribusi Pendapatan. *Jurnal Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan*.
- Prasetyo, B. (2022). Pembangunan Infrastruktur dan Pengaruhnya pada Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*.
- Rahayu, M. (2022). Evaluasi Efektivitas Subsidi dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan*.
- Sari, D., & Putri, R. (2021). Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia . *Jurnal Kebijakan Ekonomi*.
- Sari, D., & Putri, R. (2021). Kebijakan Pajak Progresif dan Dampaknya pada Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*.
- Triamalia, R., Anggraeni, E., & Noviarita, H. (2023). Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Perilaku Konsumen Berbelanja: Studi Putra Baru (Pb) Swalayan Kota Metro. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(1), 860–868.
- Yulianti, S. (2022). "*Peran Sektor Swasta dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Peran Sektor Swasta dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program CSR dan Pelatihan Kerja*".